



Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Koperasi Pondok Pesantren

Ulfah N B Fitri¹, M Fatkhurrahman N J Latief², Iqbal Bukhori³, Ara Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Bandung 40614 Telp. (022) 7800249

Volume 5 Nomor 1
April 2021: 69-81
DOI: 10.30997/jtm.v5i1.3812

Article History

Submission: 22-01-2021

Revised: 10-03-2021

Accepted: 02-04-2021

Published: 27-04-2021

Kata Kunci:

Manajemen Pembiayaan
Pendidikan, Koperasi Pondok
Pesantren.

Keywords:

*Education Financing Management,
Boarding School Cooperatives*

Korespondensi:

Ulfah Nurul Badriyatul Fitri
+62 821-2824-5935
ulfahnurulbadriyatul@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan tentang manajemen pembiayaan pendidikan berbasis koperasi pondok pesantren (KOPONTEN) di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kopontren merupakan usaha mandiri yang memiliki prinsip dari pesantren, oleh pesantren, dan untuk pesantren. Adanya kopontren ini sebagai wujud kemandirian pesantren dalam mengembangkan potensi manajemen pembiayaan pendidikan. Adanya kopontren ini membantu meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kategorisasi data dan penafsiran data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor tidak jauh berbeda dengan manajemen pembiayaan pendidikan pada umumnya. 2) perolehan biaya pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor diperoleh dengan empat sumber dana. Pertama, diperoleh langsung dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diambil setiap bulannya. Kedua, diperoleh dari swadaya masyarakat sekitar pondok melalui infaq dan wakaf. Ketiga, melalui pemerintah yaitu dana BOS yang diberikan setiap tahun. Keempat, dari hasil usaha pesantren yaitu melalui Koperasi Pondok Pesantren. 3) hasil usaha Koperasi Pondok Pesantren seluruhnya dikelola oleh Pondok dan dialokasikan untuk kemajuan pendidikan di Pondok.

Management of Education Financing Based on Islamic Boarding School Cooperatives

Abstract: This research describes the education financing management based on the Islamic boarding school cooperative (KOPONTEN) in Islamic Modern Boarding School Darussalam Gontor. Kopontren is an independent business that has the principles of pesantren, by pesantren, and for pesantren. The existence of this Kopontren is a form of independence of the pesantren in developing the potential for education financing management. The existence of this Kopontren helps improve the



quality of education in pesantren. This research is a qualitative research. Methods of data collection using observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques used data categorization and data interpretation. The results of this study indicate that: 1) education financing management at the Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School is not much different from education financing management in general. 2) education fees at the Islamic Modern School Darussalam Gontor were obtained from four sources of funds. First, it is obtained directly from educational guidance donations (SPP) which are taken every month. Second, obtained from self-help from the community around the pesantren through infaq and waqf. Third, through the government, namely BOS funds which are given annually. Fourth, from the profit of the pesantren's business, namely through the Pondok Pesantren Cooperative. 3) the results of the Pondok Pesantren Cooperative are entirely managed by the Pondok and allocated for the advancement of education in the Pondok.

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga nonformal umumnya memiliki keterbatasan dalam sumber pembiayaan. Hal yang belum terpenuhi di lingkungan pesantren diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, kemandirian dalam pembiayaan, dan pemerataan kesempatan menjadi. Keterbatasan anggaran berdampak pada rendahnya mutu pendidikan pesantren. Pesantren telah masuk dalam kebijakan Pemerintah dengan dimuat pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 30 dan telah diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan*

Pendidikan Keagamaan dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur tentang penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pendanaan pendidikan. Dalam UU tahun 2003, No. 20 bab 13 Pasal 46 ayat 1, tentang tanggung jawab pendanaan mengatur: Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003). Kemudian dalam ayat pertama dan kedua pada Pasal 47 tentang sumber dana pendidikan mengatur: Sumber dana pendidikan

ditentukan berdasarkan asas keadilan, memadai, dan berkelanjutan.

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memandu sumber daya yang ada sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selama ini sumber dana biasanya berasal dari orang tua Santri (uang sekolah), masyarakat, pemerintah, dan penyandang dana pendidikan. Mengingat terbatasnya anggaran dari sumber-sumber tersebut, pesantren perlu mencari solusi sumber pembiayaan agar pesantren jadi mandiri. Salah satu cara untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren adalah dengan mendirikan koperasi pesantren. Salah satu pondok pesantren yang memiliki Koperasi Pesantren adalah Pondok Modern Darussalam Gontor.

Koperasi pondok pesantren (biasa disebut Kopontren) menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang berada di lingkungan pondok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal dan eksternal pondok pesantren. Dalam perkembangannya, Kopontren di Pondok Modern Gontor

tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok, namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Kopontren dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama untuk mendukung mekanisme kehidupan ekonomi pesantren, yang kedua menjadi pembina kader koperasi, ketiga adalah penggerak sosial ekonomi pondok pesantren.

Pondok Pesantren Darussalam berlokasi di Ponorogo Desa Gontor, pondok ini memiliki koperasi pondok pesantren yang bernama 'Latansa'. Produk yang dijual lebih dominan kepada produk yang dibutuhkan oleh santri dalam beraktivitas sehari-hari. Diantaranya percetakan buku Darussalam, konveksi Latansa, Asia fotokopi, kantin Azhar, warung telepon, material bangunan, wisma penginapan dan lain-lain. Masyarakat sekitar Pondok dijadikan *partner* di tiap-tiap bisnis usahanya. Adanya Kopontren berfungsi sebagai pendukung kehidupan ekonomi pesantren. Ulwan Maghfur sebagai pengurus pada bagian administrasi mengemukakan, bahwa hasil dari usaha Kopontren sangat berperan aktif

dalam membantu pengembangan pembangunan dan pembiayaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. (Maghfur, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan kategorisasi data dan penafsiran data. Penelitian ini menawarkan alternatif dalam mengelola pembiayaan pendidikan di pesantren dengan memaksimalkan pendanaan mandiri dari hasil usaha pesantren yaitu koperasi pondok pesantren.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Pondok Modern Darussalam Gontor terletak di Ponorogo Jawa Timur Desa Gontor didirikan pada 10 April 1926 M. Gontor dikelola oleh Badan Wakaf yang beranggotakan alumni pesantren dan tokoh-tokoh

yang peduli Islam sebagai penentu kebijakan pondok pesantren. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dilakukan oleh tiga orang tokoh yaitu KH Hasan Abdullah Sahal (Putra KH Ahmad Sahal). Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasy (putra dari KH Imam Zarkasy) dan KH Syamsul Hadi Abdan, S.Ag. Program pendidikan disini disebut dengan Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiah (KMI) yang setara dengan lulusan sekolah menengah diselenggarakan selama enam tahun. Jumlah santri sebanyak 4.498 orang yang seluruhnya mukim.

Dalam pendiriannya Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Gontor bertujuan untuk memberikan bantuan dan manfaat bagi kemajuan pondok pesantren serta membantu para pengurus di pesantren agar mereka mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonominya. Sehingga para tenaga pengajar merasa nyaman dan bisa mengajar dengan tenang karena kebutuhan ekonominya sudah terbantu.

Kopontren Darussalam Gontor (dikenal dengan nama Latansa)

mengembangkan unit usaha percetakan buku Darussalam, konveksi Latansa, Asia fotokopi, kantin Azhar, warung telepon, material bangunan, wisma penginapan, dan sebagainya. Keseluruhan unit usaha tersebut bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Warga sekitar diberikan kesempatan untuk menyetorkan barang dagangannya, sehingga disamping membantu ekonomi warga, pesantren diharapkan mampu ikut serta membantu perekonomian pesantren.

Tabel 1 Unit Usaha Koperasi Pesantren Darussalam Gontor

No	Unit Usaha	Letak	Berdiri
1	Penggilingan Padi	Ds. Gontor	1970
2	Percetakan Darussalam	Ds. Gontor	1983
3	KUK Palen	Ds. Bajang	1985
4	KUK Toko Besi	Ds. Bajang	1988
5	Toko Buku La Tansa	Ponorogo	1989
6	UKK Mini Market	Ds. Gontor	1990
7	Wartel Gambia	Ds. Gontor	1991
8	Apotik La Tansa	Ponorogo	1991
9	Pabrik Es	Ds. Gontor	1996
10	Perkulakan	Ds. Gontor	1997
11	Kendaraan	Ds. Gontor	1998
12	Kantin Al-Azhar	Ds. Gontor	1999
13	Wisma Darussalam	Ds. Gontor	1999

14	Wartel Sudan	Ds. Gontor	1999
15	Darussalam Computer Center	Ds. Gontor	1999
16	Fotocopi Asia	Ds. Gontor	2000
17	Potong Ayam	Ds. Gontor	2002
18	Pabrik Roti	Ds. Gontor	2003
19	Air Minum La Tansa	Ds. Gontor	2004
20	Toko Alat Olahraga	Ponorogo	2005
21	Konveksi	Ds. Gontor	2006
22	Teh La Tansa	Ds. Gontor	2009
23	Es krim	Ds. Gontor	2012

Sumber 1 Pengelola Umum Koperasi Latansa

Tujuan didirikannya Kopontren adalah untuk mencapai tujuan khusus, yaitu mewujudkan pesantren yang dapat berkembang secara mandiri dari segi ekonomi dan menjadi pusat pelatihan bagi siswa dan guru untuk belajar tentang perniagaan. Secara tidak langsung Kopontren akan menumbuhkan minat wirausaha dengan keikhlasan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, berani berkorban dan tulus hati. Dengan demikian, manfaat dari kegiatan wirausaha ini dapat dinikmati bersama. Dengan motto dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Sementara dari sisi status ekonomi Kopontren telah meningkatkan citra pondok, dengan menghapuskan label pondok pesantren sebagai lembaga distributor proposal dana bantuan.

Pembahasan

Dalam PP No. 48 tahun 2008 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan," 2005). Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu biaya pendidikan melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Kerjasama antara keduanya adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam menunjang dan mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah serta desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan sebagai media pendukung dalam mengefektifkan kegiatan belajar mengajar serta mendukung dalam peningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk menjawab hal tersebut maka pesantren sebagai lembaga pendidikan mewujudkan kemandiriannya dengan adanya Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

Dalam penelitian tentang pengembangan koperasi di pondok pesantren salafiah Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa koperasi di pesantren memiliki keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lain karena menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam proses dan mekanisme kerjanya, sedangkan faktor material lain hanyalah alat bantu. koperasi tersebut memiliki kemampuan dalam mengurangi kemiskinan, menyerap pengangguran, memperkuat integrasi sosial, dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di sekitar pondok (Marsudi, Usman Arief, 2011).

Secara yuridis peraturan mengenai koperasi dimuat dalam Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun 1965 bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila ("Jenis Koperasi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia," 2010). Tingginya pergerakan koperasi di pesantren

merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep *ta'awun* (saling menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), *tholabul ilmi* (menuntut ilmu) dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya.

Eksistensi Koperasi Pondok pesantren dapat ditinjau melalui tiga dimensi yaitu sebagai pendukung dalam mekanisme kehidupan ekonomi pondok pesantren, kedua sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan dan ketiga sebagai stimulator sosio-ekonomi masyarakat desa di sekitar pondok pesantren (Marsudi, Usman Arief, 2011).

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis koperasi pondok pesantren (Kopontren) secara teori tidak jauh berbeda dengan manajemen pembiayaan pada umumnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Namun dalam melaksanakan manajemen pengelolaan biaya pendidikan dibantu oleh hasil usaha kopontren tersebut. Berikut ini adalah rincian tahapan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis

kopontren di Pondok Modern Darussalam Gontor:

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kopontren

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan kegiatan dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana kapan dan berapa lama akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksananya (Wiyani, 2020). Perencanaan mencakup pengaturan secara kordinatif terhadap sumber-sumber daya manusia dan material untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menimbulkan pengaruh negatif (Masditou, 2017).

Perencanaan pembiayaan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Penerapan pembiayaan berbasis kopontren sejatinya hanya ingin membantu biaya pendidikan agar tidak

memberatkan kepada wali santri. Adanya hasil usaha kopontren ini sangat membantu proses kegiatan pendidikan dengan bantuan pengadaan sarana prasarana, kesejahteraan guru-guru, dan meringankan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

a. Menentukan Biaya Pendidikan Berbasis Kopontren

Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki sumber dana penyelenggaraan pendidikan berasal dari APBD pemerintah, uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari peserta didik, swadaya masyarakat, dan hasil usaha kopontren . Dana BOS yang diberikan pemerintah kepada Pondok Modern Darussalam Gontor hanya mencukupi 10% dari total anggaran pendidikan di madrasah. Uang sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) santri 70% digunakan untuk gaji guru dan biaya hidup santri di pondok. Adapun swadaya masyarakat dan hasil usaha

kopontren digunakan untuk sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan guru-guru.

Keberadaan koperasi bagi setiap pondok pesantren telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi pondok. Dampak dari adanya koperasi dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu pertama Kopontren sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi pondok pesantren, kedua Kopontren sebagai media pembinaan entrepreneur, dan ketiga Konpontren sebagai lembaga yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren (Azizah, 2014). Peranan kopontren hadir di tengah pesantren sebagai lembaga yang membantu penjaminan ekonomi bagi setiap pondok pesantren, sedangkan keberadaannya di tengah masyarakat Kopontren dapat membuka kesadaran terhadap kepentingan

berekonomi secara aktif dan meningkatkan produktifitas masyarakat sekitarnya (Amrullah, 2019).

Dalam mewujudkan dan meningkatkan kemajuan koperasi baik itu dibidang ekonomi maupun keorganisasian koperasi diperlukan sebuah strategi manajemen. Hal ini dimaksudkan agar tujuan bersama yang tersirat dalam visi dan misi bisa tercapai dengan tepat dan efektif, sehingga harus diimbangi atau diimplementasikan lewat strategi-strategi dalam pengelolaan koperasi tersebut.

b. Menentukan Standarisasi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kopontren

Dalam menentukan standarisasi pembiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan menggunakan skala kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar santri tidak dibebani dengan biaya-biaya lain selain kebutuhan santri langsung. Pembiayaan sarana

prasarana pendidikan maupun kepesantrenan di biayai langsung oleh hasil usaha kopontren. Sehingga para santri mendapatkan sarana prasarana yang layak dengan dana biaya yang cukup relatif terjangkau.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Kopontren

Pelaksanaan pembiayaan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan (Wiyana, 2020). Pelaksanaan merupakan usaha untuk merealisasikan perencanaan dengan berbagai pengarahannya. Fungsi pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Amrullah, 2019).

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis kopontren di Gontor sampai saat ini terbilang sangat lancar dan bisa menunjang kegiatan belajar mengajar para siswanya. Gerakan ekonomi di Pondok Modern Darussalam

Gontor dimulai sejak 1970. Adapun dalam pelaksanaannya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan:

a) Penerimaan

Anggaran yang diterima dari tiga sumber pembiayaan (SPP, Pemerintah, dan Swadaya), dikumpulkan dan digunakan sesuai kebutuhan sekolah. Pengumpulan anggaran di pegang oleh bendahara. Menjadi hal unik disini untuk dana hasil usaha kopontren tidak dipegang oleh bendahara sekolah melainkan oleh bagian administrasi Pondok Gontor yang sekaligus menjadi bendahara pondok.

Tabel 2 Dana Pemasukan Pembiayaan Pendidikan

No.	Iuran Santri	Swadaya	Hasil Usaha	Pemerintah
1	Uang Pendaftar Rp. 6.000.000,00	Infaq Rp. 100.000,00 - Rp. 150.000,00/tahun	Rp. 200.000.000 - Rp. 250.000.000 (tergantung kebutuhan)	BOS : Rp. 250,000 /santri di Pulau Jawa
2	SPP /bulan Rp. 600.000.	Wakaf Sarana Prasarana		
3	Daftar Ulang			

/tahun
Rp.
3.500.000,00

Sumber 1 Bagian Administrasi Pondok

b) Pengeluaran

Pengeluaran pembiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor ditentukan dengan skala prioritas kebutuhan sekolah agar tidak terjadi ketidakseimbangan dan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu kepala sekolah dan bagian administrasi pondok selalu bekerja sama dan memusyawarahkan setiap anggaran yang ada supaya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.

Dalam pengeluaran anggaran di Pondok Modern Darussalam Gontor meliputi pengeluaran rutin dan non rutin, pengeluaran rutin ini meliputi pengeluaran bulanan yang harus dikeluarkan setiap bulan seperti pembayaran listrik dan honor guru. Adapun pengeluaran non

rutin dilaksanakan jika ada kebutuhan mendadak menyangkut pendidikan. Pengeluaran anggaran dicatat dan dibukukan oleh bendahara dan bagian administrasi pondok sebagai tanda bukti pengeluaran. Pondok Modern Darussalam Gontor melakukan prinsip efisiensi dalam mengelola anggaran, yaitu anggaran digunakan secara tepat dan juga mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan.

3. Evaluasi pembiayaan pendidikan

Evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang direncanakan benar-benar telah tercapai (Wiyani, 2020). Pondok Modern Darussalam Gontor melakukan evaluasi setiap kebutuhan dan kegiatan yang membutuhkan dana. Dalam melaksanakan evaluasi bendahara dibantu oleh bagian administrasi sebagai pengelola keuangan seluruh santri di pondok. Bentuk evaluasi yang dilakukan mencakup laporan keuangan

anggaran bantuan dari mulai SPP santri, anggaran Pemerintah, swadaya masyarakat, dan hasil usaha pondok. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Juga untuk dijadikan pedoman memperbaiki kepengurusan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor

4. Laporan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Laporan yang dilakukan oleh bendahara disampaikan kepada bagian administrasi pondok, bendahara dan bagian administrasi pondok yang kemudian melaporkan kepada pimpinan pondok setiap bulannya. Laporan-laporan dapat berupa tulisan maupun secara lisan langsung kepada pimpinan pondok. Karena anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola langsung oleh pondok.

Berdasarkan penjelasan melalui teknik wawancara dan

observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan anggaran selalu melibatkan pimpinan pondok. Karena hasil usaha pondok ikut andil dalam pembiayaan pendidikan. Pengawasan yang transparan pula dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada para pengelola sekolah dalam mengembangkan dan mengelola sekolah. Berkaitan dengan pengawasan Pondok Modern Darussalam Gontor sudah cukup baik, hal ini berdasarkan data yang menyebutkan pengawasan dilakukan akhir semester. Untuk keseluruhan manajemen pembiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah menjalankan dengan cukup baik. Walaupun dalam proses pengawasan di Pondok Modern Darussalam Gontor sedikit berbeda. Perbedaannya pengawasan bukan langsung oleh pimpinan melainkan oleh bagian administrasi pondok yang kemudian dilaporkan ke pimpinan

pondok. Namun dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik hal ini karena adanya sistem transparansi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam melakukan pengawasan.

SIMPULAN

Pembiayaan pendidikan berbasis koperasi pondok pesantren merupakan model pembiayaan baru yang ada dilingkungan pesantren. Koperasi pondok pesantren menjadi salah satu sumber dana pendidikan yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis kopontren di Pondok Modern Darussalam Gontor diterapkan guna membantu para santri dalam biaya pendidikan sehingga tidak terlalu mahal.

Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat pesantren sendiri, maka permodalan di pondok tidak bergantung pada bantuan pemerintah saja. Dari awal berdirinya pondok ini menjadi pondok pesantren mandiri baik dalam pembiayaan

maupun dalam pengembangan pesantrennya. Tetapi, hal itu tidak bermaksud bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor tidak menerima atau menolak bantuan dari pemerintah. Ia juga akan menerima setiap bantuan yang tidak menetapkan syarat-syarat yang ketat. Dengan prinsip menjadi pondok mandiri tersebut, Pondok Modern Darussalam Gontor terus berupaya memperbaiki manajemen pembiayaan pendidikan sehingga sampai kepada yang diharapkan oleh seluruh masyarakat pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah mengizinkan penelitian kami di tengah pandemic ini. Terimakasih kepada bendahara dan bagian administrasi pondok serta pihak lain yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga. *Tadabbur*, 1(2), 257-277.
- Azizah, S. N. (2014). Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi. *EKBISI*, IX(1), 103-115.
- Jenis Koperasi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2010).
- Marsudi, Usman Arief, dan S. Z. (2011). PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI PONDOK PESANTREN PERGURUAN ISLAM SALAFIAH KABUPATEN BLITAR. *JSH*, 4(2), 164-176.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *JURNAL ANSIRU*, 1(2), 119-145.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005), 1-39.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Wiyani, N. F. N. A. (2020). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *HIJRI*, 9(1), 1-19.